MODEL MSN-*Approach* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KERATON DI KOTA CIREBON

Sri Wulandari[1], Soleh Suryadi[2], Bambang Heru Purwanto[3]
NPM.209020046

[1]Universitas Swadaya Gunung Jati,[123]Universityas Pasundan
Email : wlnlivia@gmail.com

ABSTRACT

The focus of the research is the description and analysis of policy implementation in the development of palace tourism in the city of Cirebon. While the sub focus of the research is the analysis of the factors that cause the implementation of the palace tourism development policy in the city of Cirebon has not been effective. The analysis is based on the theory of policy implementation of the Mentality, System and Networking (MSN) Approach

The research method used is a qualitative method. Qualitative methodology is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. The research strategy in the qualitative approach used is a case study strategy

Based on the results of the research that the Palace still preserves the values of local cultural wisdom. The design of an effective policy implementation model to develop Keraton tourism in the City of Cirebon based on the Mentality, System, and Networking (MSN) Approach model. -2025. RIPPARDA West Java Province 2015-2025 and RIPPARDA Cirebon City 2019-2025 are regulations as the legal basis for developing palace tourism in Cirebon City. In the MSN Approach Model, this System Approach will affect the implementation of the palace tourism development policy in Cirebon City.

1. *The policies in the form of RIPPARDA of West Java Province 2015-2025 and RIPPARDA of Cirebon City 2019-2025 were then implemented in the development of palace tourism in Cirebon City.*
2. *Stakeholders or actors involved in the implementation of the palace tourism development policy in Cirebon City, namely the palace, the Cirebon City Government, the private sector, and the community. In addition, it needs the involvement of academia and the press/media.*
3. *Stakeholders or actors involved in the implementation of the palace tourism development policy in Cirebon City in the perspective of the Networking Approach need to build strategic partnerships, synergies, and symbiotic mutualism.*
4. *This Networking Approach will affect the implementation of the palace tourism development policy. Stakeholders or actors involved in the implementation of the palace tourism development policy in Cirebon City, in the perspective of the Mentality Approach, it is necessary to realize effective attitudes, behaviors, and responsibilities. This mentality approach will also affect the implementation of tourism development policies.*
5. *The implementation of the palace tourism development policy also needs to implement other factors that become novelty, namely the political will of the regional head, the leadership of the regional head, organizational culture, and motivation. The factors as novelty will also affect the implementation of the palace tourism development policy in Cirebon City.*
6. *The implementation of the palace tourism development policy in Cirebon City which applies the Mentality Approach, System Approach, and Networking Approach, as well as the author's research Novelty, will result in an effective implementation of the palace tourism development policy in Cirebon City.*

Keywords: MSN-Approach, Tourism Development, Policy

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor pembangunan yang sangat potensial untuk meningkatkan devisa negara dan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang sangat strategis karena Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif berupa keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya. Keunggulan yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan sumber daya dan modal pembangunan pariwisata untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sektor pariwisata sangat stretegis karena memiliki multiplier efect terhadap sektor-sektor pembangunan lainnya. Melalui pembangunan pariwisata di suatu daerah, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, khususnya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari sektor pariwisata.

Pembangunan pariwisata di tingkat nasional dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), sedangkan di tingkat daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Ada tiga kunci sukses pembangunan pariwisata yaitu aksebilitas, amenitas dan atraksi. Aksebilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Amenitas pariwisata adalah fasilitas pariwisata yaitu semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan destinasi pariwisata. Atraksi wisata adalah daya tarik wisata baik alam maupun buatan yang berada di dalam suatu wilayah dan memiliki daya tarik yang dapat mendatangkan wisatawan, misalnya pantai,danau, pegunungan, situs budaya, taman, industri, pameran, dan lain-lain.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi daerah tujuan wisata karena memiliki potensi wisata yang beragam dan menarik yang tersebar di setiap kabupaten/kota berupa keindahan alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya. Potensi tersebut merupakan sumber daya dan modal pembangunan pariwisata Jawa Barat. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan pada Pasal 2 disebutkan bahwa maksud penyelenggaraan kepariwisatwaan adalah dalam rangka menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang secara optimal dan fungsional, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Kemudian pada Pasal 4 dinyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Salah satu daerah di Jawa Barat yang ditunjuk sebagai percontohan kota pariwisata adalah Kota Cirebon. Perkembangan Kota Cirebon sangat pesat dibandingkan dengan kabupaten dan kota

lainnya di Jawa Barat. Hal ini karena letak Kota Cirebon secara geografis sangat strategis yaitu terletak dipantai utara pulau Jawa yang berbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pariwisata di Kota Cirebon didukung pula dengan fasiltas infrastruktur yaitu hadirnya tol Cipali, tol Trans Jawa dari Cikampek ke Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya sampai Pasuruan, dibangunkannya rel kereta api ganda (*double track*) yang menghubungkan Kota Cirebon dengan daerah-daerah lain. Selain itu, terdapat Bandara Udara International Jawa Barat di Kertajati Majalengka yang merupakan bandara terbesar kedua setelah bandara Soekarno-Hatta yang melayani perjalanan domestik.

Kota Cirebon memiliki potensi wisata yang besar yang perlu dikembangkan dengan baik yaitu sebagai berikut :

1.Wisata budaya yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Keprabonan, Mesjid Agung Sang Cipta Rasa, Situs Kalijaga/Taman Kera, Taman Gua Suyaragi, dan petilasan-petilasan di Kota Cirebon.

2.Wisata buatan yaitu Taman Ade Irma Suryani/Cirebon Water Park.

3.Wisata pesisir yaitu Pantai Kejawanan dan Pantai Kesenden.

4.Wisata sejarah yaitu kawasan Pecinan dan kawasan Kampung Arab.

5.Wisata kuliner khas Cirebon yaitu empal gentong, nasi Jamblang, tahu gejrot, nasi lengko, mie koclok, sate kalong, dan lain-lain.

6.Wisata belanja di berbagai pasar tradisional, mall dan pusat-pusat perbelanjaan.

7.Wisata ekonomi kreatif yaitu kuliner, atraksi kesenian, souvenir dan lain-lain.

Potensinya yang besar tersebut menyebabkan Kota Cirebon saat ini sedang diposisikan sebagai pusat Metropolitan Cirebon Raya (MCR) sebagai kota budaya dan sejarah serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal. Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah di nusantara yang memiliki sejarah panjang kebudayaan Islam dan sebagai kota tua yang sarat dengan kisah-kisah sejarah bernuansa religi dan budaya karena menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat oleh salah satu Wali Sanga yaitu Sunan Gunung Jati yang juga merupakan Sultan dari Kesultanan Cirebon. Kota Cirebon juga dikenal sebagai salah satu kota bersejarah yang memiliki keunikan yang khas karena pada kota ini terdapat tiga keraton yang merupakan pecahan dari Kesultanan Cirebon yang pernah berjaya pada abad ke-15 hingga abad ke-18. Kota Cirebon sebagai kota budaya dan sejarah kemudian dijadikan Visi Kota Cirebon 2018-2023 yaitu "SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Inovatif) Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah".

Pengembangan pariwisata di Kota Cirebon adalah merealisasikan Visi Kota Cirebon tersebut melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Cirebon Tahun 2019-2025. RIPPARDA merupakan payung hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Kota Cirebon yang terencana, terpadu dan berkesinambungan. Di dalam RIPPARDA Kota Cirebon Pasal 5 ditetapkan visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon yaitu "Terwujudnya Kota Cirebon sebagai destinasi wisata berkelas dunia, yang terintegrasi, berkelanjutan serta berbasis sejarah dan budaya daerah".

Keraton merupakan salah satu potensi unggulan pariwisata di Kota Cirebon karena di Kota Cirebon terdapat empat keraton yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Keprabonan. Empat Keraton ini menjadi situs budaya Kota Cirebon yang menjadi saksi episentrum kebudayaan yang menjadi daya tarik lokal maupun manca negara. Keberadaan empat keraton ini merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki Kota Cirebon karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki keraton. Selain itu, berbeda dengan di Yogyakarta dan Solo yang masing-masing hanya memiliki satu keraton, Kota Cirebon memiliki empat keraton. Salah satu keraton di Kota Cirebon yaitu Keraton Kasepuhan memiliki peran sejarah sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat oleh Sunan Gunung Jati yang sekaligus sebagai Sultan di Kesultanan Cirebon.

Sebelum RIPPARDA Kota Cirebon ditetapkan, wisata keraton di Kota Cirebon telah ditetapkan sebagai wisata unggulan di dalam RIPPARDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025. Di dalam RIPPARDA Provinsi Jawa Barat tersebut, Kota Cirebon ditetapkan sebagai pusat Destinasi

Pariwisata Propinsi (DPP) Cirebon Raya. Implikasinya, Kota Cirebon merupakan Pusat Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata (KSPP) Sejarah dan Keraton Cirebon dan sekitarnya. Secara lebih rinci dinyatakan dalam Pasal 22 yaitu Rencana Pembangunan KSPP Kawasan Pariwisata Sejarah dan Keraton di Daerah Kota Cirebon dan sekitarnya yaitu:

1. Tema pengembangan adalah pariwisata sejarah dan keraton.
2. Sasaran pengembangan adalah pariwisata terpadu berbasis sejarah dan keraton Cirebon.
3. Daya tarik wisata primer meliputi Keraton Kasepuhan, Kacirebonan, Kanoman, Kaprabonan, dan Kawasan Mesjid Agung Sang Ciptarasa di Daerah Kota Cirebon, serta Kawasan Makam Sunan Gunung Jati di Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Daya tarik wisata sekunder meliputi Taman Air Gua Sunyaragi, Pantai Kesenden, Taman Ade Irma Suryani, Pantai Kejawanan, dan Taman Kalijaga di Daerah Kota Cirebon, serta Kawasan Talun dan Batik Trusmi di Daerah Kabupaten Cirebon.

Kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon yang ditetapkan di dalam RIPPARDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 dan RIPPARDA Kota Cirebon Tahun 2019-2025 tersebut harus diimplementasikan secara efektif. Menurut Kadji (2015:88), implementasi kebijakan berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan bermuara langsung dengan tiga dimensi policy of stakeholders yang meliputi government, private sector, dancivil society. Sebuah implementasi kebijakan akan menjadi terarah dan aktual jika memperhatikan mentality, system dan networking di antara ketiga policy of stakeholders tersebut. Mentality (mentalitas) meliputi sikap, perilaku dan tanggung jawab; System (sistem) meliputi sistem regulasi, sistem nilai budaya, sistem struktur dan fungsi organisasi, sedangkan Networking (jejaring) meliputi kemitraan strategis, sinergitas, dan simbiosis mutualisme.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon belum efektif. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena atau indikasi yaitu :

1. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kota Cirebon dalam pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya pariwisata keraton. Hal ini terlihat dari minimnya APBD Kota Cirebon untuk pengembangan pariwisata.Dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon sebagai leading sector pengembangan pariwisata, pada tahun anggaran 2018 hanya memperoleh anggaran Rp 500 Juta, kemudian menurun pada tahun anggaran 2019 menjadi Rp 300 Juta. Anggaran sebesar ini sangat tidak memadai untuk pengembangan pariwisata di Kota Cirebon, termasuk di dalamnya untuk pengembangan pariwisata keraton. Idealnya, untuk pengembangan pariwisata di Kota Cirebon diperlukan anggaran sekitar Rp 7 Milyar.
2. Kurangnya komitmen, tanggung jawab dan partisipasi private sector yaitu perusahaan untuk membantu Pemerintah Kota Cirebon dalam pengembangan pariwisata keraton secara kolaboratif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Perusahaan. Padahal, potensi dana CSR/TJSL di Kota Cirebon sangat besar yaitu mencapai Rp 1 Trilyun per tahun, sedangkan APBD Kota Cirebon sendiri hanya sekitar Rp 1,6 Trilyun. Dari ratusan perusahaan besar dan sedang di Kota Cirebon yang memiliki Program CSR/TJSL, hanya Bank Bjb yang pernah menyalurkan dana CSR/TJSL-nya untuk Keraton Kasepuhan sebesar Rp 150 Juta pada tahun 2018 yang lalu.
3. Sikap dan perilaku masyarakat di sekitar keraton yang kurang menjunjung tinggi sadar wisata dan sapta pesona. Sadar wisata yaitu partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerahnya. Sedangkan sapta pesona adalah tujuh daya tarik obyek wisata yang meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Hal ini terlihat dari keberadaan pasar tradisional di pintu gerbang masuk Keraton Kanoman yang menimbulkan kesan kumuh dan kotor. Selain itu, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Keraton Kasepuhan yang mengganggu keindahan di sekitar keraton.
4.Regulasi berupa RIPPARDA Kota Cirebon sebagai payung hukum untuk pengembangan pariwisata di Kota Cirebon, termasuk di

dalamnya pengembangan pariwisata keraton, baru ditetapkan pada bulan Agustus 2019 yang berlaku untuk tahun 2019-2025. Sementara regulasi di atasnya yaitu RIPPARDA Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan pada tahun 2015 dengan masa berlaku untuk tahun 2015-2025. Sebelum RIPPARDA Kota Cirebon ditetapkan, pengembangan pariwisata keraton menggunakan dasar hukum berupa RIPPARDA Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya antara lain mengatur tentang pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.

5. Struktur dan fungsi organisasi yang belum optimal karena urusan kepariwisataan tidak ditangani oleh satu Dinas Pariwisata secara khusus dan mandiri tetapi hanya ditangani oleh satu Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon. Selain itu, DKOKP Kota Cirebon kurang didukung oleh aparat/sumber daya manusia yang handal di bidang pariwisata.

6. Belum terjadi simbiosis mutualisme antara Pemerintah Kota Cirebon dengan pihak keraton karena dari pariwisata keraton ini pihak Pemerintah Kota Cirebon tidak memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tiket masuk keraton. Pendapatan dari tiket masuk ke keraton ini sepenuhnya menjadi milik pihak keraton. Pemerintah Kota Cirebon hanya memperoleh PAD secara tidak langsung dari wisata keraton dari wisatawan melalui Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir.

7. Belum terwujud sinergitas yang efektif antara Pemerintah Kota Cirebon dengan pihak keraton berkaitan dengan pengembangan pariwisata keraton, misalnya :

a. Belum terwujud sinergitas yang efektif antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Keraton Kasepuhan dalam revitalisasi alun-alun Keraton Kasepuhan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sarana olah raga, sekaligus sebagai daya tarik wisata pendukung keberadaan Keraton Kasepuhan.

b. Belum terwujud sinergitas yang efektif antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Keraton Kanoman dalam revitalisasi Pasar Kanoman. Pasar Kanoman dikelola oleh Perumda Pasar Kota Cirebon tetapi pasar ini berdiri di atas lahan Keraton Kanoman. Keberadaan Pasar Kanoman di pintu keluar masuk Keraton Kanoman akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke keraton tersebut. Selain itu, belum terwujud sinergitas yang efektif antara Pemerintah Kota Cirebon, pihak keraton, dan dunia usaha untuk bersama-sama mengembangkan wisata keraton secara kolaboratif antara ketiga stakeholders tersebut.

Terlepas dari permasalahan tersebut, pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon di tahun mendatang memiliki prospek yang baik karena :

1. Kota Cirebon memiliki keunggulan kompetetif dan komparatif dalam pengembangan pariwisata keraton, karena di Kota Cirebon terdapat empat keraton sebagai peninggalan sejarah yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Pariwisata keraton di Kota Cirebon diharapkan dapat maju seperti di Yogyakarta dan Solo meskipun di kedua kota tersebut hanya memiliki satu keraton.

2. Pengembangan pariwisata keraton sudah memiliki regulasi sebagai payung hukumnya yaitu RIPPARDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 dan RIPPARDA Kota Cirebon Tahun 2019-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RIPPARDA Provinsi Jawa Barat menempatkan pariwisata keraton di Kota Cirebon sebagai pariwisata unggulan Provinsi Jawa Barat. Hal ini kemudian diperkuat dengan RIPPARDA Kota Cirebon yang menempatkan keraton sebagai pariwisata unggulan di Kota Cirebon.

3. Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Cirebon mengalokasikan anggaran dalam APBD yang cukup besar untuk pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya pariwisata keraton yaitu sebesar Rp 3 Milyar. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan alokasi anggaran tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 300 Juta.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Disertasi dengan judul: "**Model MSN-Approach Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton di Kota Cirebon**."

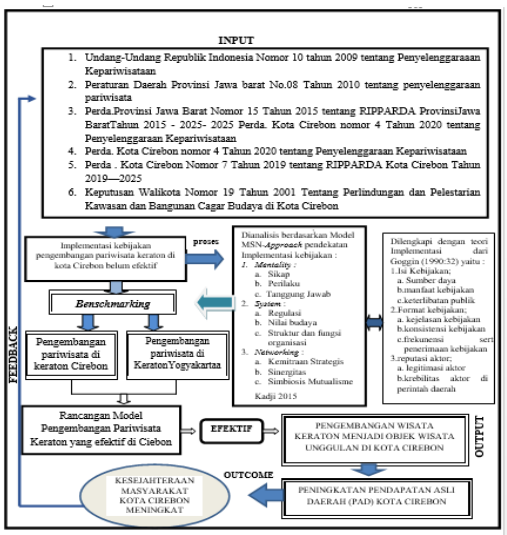

Gambar 1. Kerangka berpikir

Proposisi

Berdasarkan uraian kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah penulis paparkan pada bagian terdahulu, maka penulis merumuskan proposisi sebagai berikut :

1) Implementasi kebijakan pariwisata Keraton di kota Cirebon belum efektif.

2)Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Keraton di Cirebon belum efektif yaitu faktor-faktor *Mentality* (sikap, perilaku, tanggung jawab), *System*(regulasi, nilai budaya, struktur dan fungsi organisasi), dan Networking (kemitraan strategis, sinergitas, simbiosis mutualisme), serta faktor-faktor yang menjadi novelty penelitian.

3) *Benchmarking* implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Keraton di Daerah Istimewa Yogyakarta

4) Rancangan model implementasi kebijakan yang efektif untuk mengembangkan pariwisata keraton di Kota Cirebon adalah model *Mentality System Networking Approach* yang dimodifikasi dan ditambah dengan novelty penelitian.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975-5) mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Strategi penelitian dalam pendekatan kualitatif yang penulis gunakan adalah strategi studi kasus menurut John W. Creswell (2014:20) Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti akan menggambarkan pengembangan pariwisata di Kota Cirebon yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisisnya tetapi tanpa menghitung pengaruh dari suatu variabel.

Peneliti ini menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di kota Cirebo dan faktor-faktor yang menyebabkan implementasinya belum efektif, juga akan menghasilkan suatu produk berupa model kebijakan pengembangan pariwisata keraton yang efektif di Kota Cirebon. Analisis implementasi pengembangan pariwisata Keraton di Kota Cirebon dan faktor-faktor yang menyebabkan implementasinya belum efektif dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, Sedangkan untuk menghasilkan suatu produk berupa model kebijakan pengembangan pariwisata keraton di kota Cirebon menggunakan metode Soft System Methodolgy (SSM) dan Research and Development (R & D).

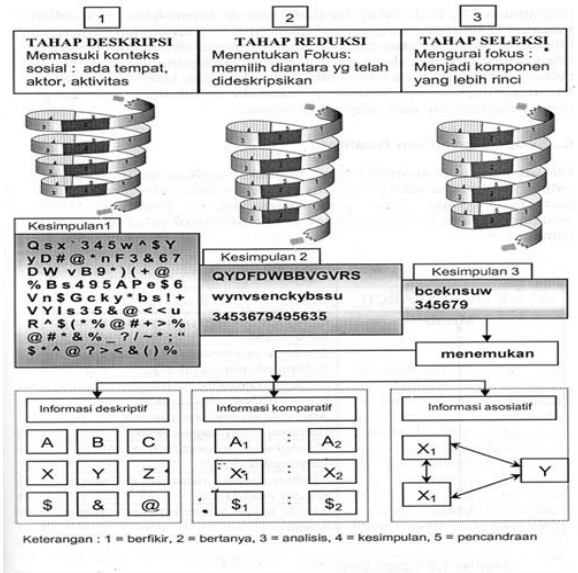

Gambar 2. Metode Penelitian Kualitatif

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton di Kota Cirebon.

Keraton merupakan salah satu daya tarik wisata dan menjadi sasaran dan tujuan kunjungan di kota Cirebon, dimana memiliki keunikan,

keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan budaya dan sejarah dari masa kerajaan yang pernah berjaya di Cirebon dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan lokal Cirebon, sebagai wujud perhatian pemerintah daerah untuk melestarikan kota Cirebon sebagai kota budaya dan sejarah, sesuai visi RIPPARDA Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 yakni terwujudnya kota Cirebon sebagai destinasi wisata berkelas dunia, yang terintergrasi, berkelanjutan, serta berbasis sejarah dan budaya daerah.

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Keraton di Kota Cirebon dapat dilihat dua pandangan yaitu Keraton sebagai Destinasi wisata yaitu berpedoman pada Undang – Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 dan Peraturan Provinsi Jawa barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan kepariwisataan serta RIPPARDA Kota Cirebon No. 07 Tahun 2019. Keraton sebagai Cagar Budaya berpedoman pada Undang – Undang No. 11 Tahun 2010.

Keraton sebagai destinasi wisata sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor ; 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan :

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan**.**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 8 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan kepariwisataan:

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.

Keraton sebagai Cagar Budaya berpedoman pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yaitu :

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, situs cagar Budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau dia air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Menurut Pasal 1 Bab 1 ketentuan umum Undang – Undang Nomor :11 Tahun 2010 tentang cagar budaya mengandung beberapa pengertian tentang bangunan cagar budaya yaitu :

1. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, Situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda cagar budaya adalah benda alamdan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia,
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap,
4. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Berdasarkan SK Walikota tersebut maka keraton- keraton yang ada di kota Cirebon merupakan salah satu daya tarik wisata dimana keraton sebagai cagar budaya dan keraton sebagai destinasi wisata. Implementasi kebijakan pariwisata keraton sebagai cagar budaya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11Tahun 2010 tentang cagar budaya yang kemudian diperkuat juga dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon dimana kawasan keraton di kota Cirebon merupakan kawasan cagar budaya yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Sementara Keraton sebagai destinasi wisata berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang kepariwisataan serta RIPPARDA Kota Cirebon Nomor 07 Tahun 2019 bahwa keraton merupakan area atau kawasan geografis yang berada di kota Cirebon di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata budaya dan sejarah , fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.

2. Kebijakan Pengembangan Wisata Keraton di Kota Cirebon Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwasata Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Kepariwisataan pada pasal 8 (1) bahwa dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata sebagai pedoman dan payung hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya. Pengembangan pariwisata pada Keraton-Keraton di kota Cirebon sebagai destinasi pariwisata masih menjunjung tinggi nilai budaya sesuai dengan visi pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 15 Tahun 2015 tentang RIPPARDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2025 pada pasal 9 ayat 1 bahwa :

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah provinsi adalah menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang terintegrasi, berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai budaya.

RIPPAR merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan RIPPARDA Provinsi Jawa Barat maka Keraton Cirebon menjadi sasaran pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya karena Keraton masih melestarikan nilai-nilai kearifan lokal budaya. Sebagai bentuk perhatian dalam pengembangan pariwisata Keraton di Cirebon Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cirebon setiap tahun memberikan anggaran hibah kepada 4 keraton di Kota Cirebon yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan dan Keraton Keprabonan Kota Cirebon. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mustofa selaku Bidang pariwisata di DKOP Kota Cirebon :

Keraton sebagai salah satu destinasi utama industri pariwisata sehingga keraton menjadi prioritas dan diberi dana hibah 4 keraton di kota Cirebon untuk pemeliharaan bangunan, promosi dan atraksi budaya Keraton yang diterima setiap tahun. (Hasil wawancara Tanggal 6 Januari 2020)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pihak keraton yaitu Bapak Andi selaku Staf pengelola Keraton Kasepuhan bahwa :

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cirebon memberi hibah untuk pemeliharaan Keraton, anggaran hibah tidak cukup untuk pemeliharaan keraton, hibah yang didapat hanya cukup untuk memenuhi belanja rumah tangga keraton saja. Pemerintah pusat melalui kementerian pariwisata memberikan hibah untuk seluruh keraton-keraton yang ada d Kota Cirebon tahun 2014 masterplan itu dilakukan yaitu melakukan revitalisasi tetapi baru fisik saja dan itu hanya dikeluarkan baru 30% untuk revitalisasi SDM belum terlaksana. (Hasil wawncara Tangga 4 Januari 2020)

Sementara berdasarkan wawancara dengan Walikota Cirebon menyatakan bahwa :

Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota Cirebon memberikan hibah kepada keraton-keraton di kota Cirebon untuk pemeliharaan bangunan Keraton, pernah juga pada tahun 2012 pemerintah pusat memberi hibah untuk revitalisasi pada setiap keraton cirebon.(Hasil wawancara Tanggal 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor15 Tahun 2015 tentang RIPPARDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2025 maka Keraton Cirebon

menjadi sasaran pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya karena Keraton masih melestarikan nilai-nilai kearifan lokal budaya. Keraton merupakan bangunan bernilai sejarah dan budaya yang perlu dilestarikan agar tidak punah dengan perkembangan zaman. Sebagai wujud dukungan dan perhatian maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mempertahankan pelestarian bangunan yang bernilai budaya dan sejara maka memprioritaskan pengembangan Keraton di Kota Cirebon sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya dengan rutin menganggarkan setiap tahunnya dana hibah pengembangan keraton pada APBD untuk pemeliharaan keempat Keraton yang ada di kota Cirebon yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan dan Keraton Kaprabonan .

3. Kebijakan Pengembangan Wisata Keraton di Kota Cirebon Berdasarkan RIPPARDA Kota Cirebon

Visi RIPPARDA Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 yang menjadikan Menjadikan Jawa Barat sebagai Destinasi Pariwisata Berkelas Dunia Yang Terintegrasi, Berkelanjutan dan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 bahwa Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) untuk kawasan Sejarah dan budaya adalah Keraton Kasepuhan, Kacirebonan, Kanoman, Kaprabonan yang memiliki daya tarik wisata primer yang masih menjunjung tinggi dan melestarikan nilai budaya di Jawa Barat.

Pengembangan pariwisata kota Cirebon berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam RIPPARDA. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon 2019-2025 dibuat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah yang terencana, terpadu dan berkesinambungan,serta bertujuan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan pariwisata dan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah.

Visi kepariwisataan Daerah Kota Cirebon berdasarkan RIPPARDA Kota Cirebon adalah “Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Destinasi wisata berkelas dunia, yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berbasis sejarah dan budaya daerah.” Sejalan juga dengan visi Kota Cirebon yaitu “ Sehati kita wujudkan Kota Cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah. Kota Cirebon terkenal dengan kota yang memiliki sejarah dan budaya yang sangat lengkap yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung di kota Cirebon. Bentuk bangunan yang memiliki sejarah dan budaya adalah Keraton-Keraton yang ada di Kota Cirebon yang merupakan bukti penyebaran agama islam di Jawa Barat.

Melihat potensi-potensi yang dimiliki kota Cirebon maka menjadi sangat penting untuk menetapkan kebijakan secara komprehensif bagi pengembangan kepariwisataan di Kota Cirebon yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 -2025 yang baru disyahkan oleh walikota cirebon pada tanggal 6 Agustus 2019.

Visi pembangunan kepariwisataan kota Cirebon yaitu: “Terwujudnya Kota Cirebon sebagai destinasi wisata berkelas dunia, yang terintegrasi, berkelanjutan serta berbasis sejarah dan budaya daerah.” Sepadan dengan RIPPARDA Provinsi Jawa Barat dimana Keraton Cirebon menjadi prioritas dalam pengembangan pariwisata di kota Cirebon khususnya pada destinasi wisata dan budayanya, sesuai dengan tujuan pembangunan pariwisata kota Cirebon yaitu mewujudkan pariwisata kota Cirebon sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia berlandaskan sejarah dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal.

Keraton Cirebon yang terdiri dari keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Kaprabonan merupakan destinasi wisata yang masih memegang teguh tradisi budaya Cirebon dari nenek moyan Selain memiliki daya tarik wisata peninggalan sejarah masa lalu, Tradisi Keraton ini merupakan daya tarik wisata yang dapat dinikamati hingga menimbulkan daya tarik bagi orang untuk melihat dan menikmatinya. Tradisi tersebut masih dilestarikan hingga saat ini di keraton Cirebon. Keraton-keraton tersebut adalah keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman,Keraton Kecirebonan dan Keraton Keprabonan.

4. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton di Kota Cirebon

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, secara sederhana bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting yang berkenaan dengan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah diambil atau diputuskan oleh aktor administrasi dalam proses yang melibatkan sejumlah sumber – sumber termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam hal menyelesaikan masalah – masalah publik.

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

implementasi kebijakan yang digunakan sebagai kebijakan dalam pengembangan pariwisata Keraton di kota Cirebon adalah menggunakan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dimana Keraton sebagai destinasi wisata, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dimana keraton sebaga benda cagar budaya dalam bentuk bangunan dan Surat Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2001 Keraton sebagai kawasan yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena keraton merupakan kawasan dan bangunan cagar budaya di Kota Cirebon.

Kondisi sekarang Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengimplementasikan kebijakan pengembangan Keraton Cirebon dengan melakukan komunikasi dan Sumber-sumber daya yang ada.

Implementasi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui DKOKP sebagai leading Sector kepariwisataan dalam mengembangkan kepariwisataan Keraton Kota Cirebon yaitu dengan cara mengadakan pertemuan atau rapat yang membahas tentang persoalan kepariwisataan di kota Cirebon.

Pemerintah Daerah selalu melakukan komunikasi dengan pihak keraton dan pihak-pihak yang terkait untuk membahas agenda event pariwisata yang akan diada kan oleh keraton serta agenda event kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak Keraton dan komunikasi mengenai dana hibah pariwisata yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Keraton dan agenda pelatihan-pelatihan.

Dana yang dianggarkan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang bersumber dari APBD digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pentas seni dan ritual adat tradisional sesuai dengan agenda yang diajukan ke DKOKP Kota Cirebon belum pada pemeliharaan bangunan dan SDM Keraton itu sendiri, sehingga untuk pemeliharaan Keraton dan gaji SDM yang mengelola Keraton diperoleh dari penjualan tiket pengujung di Keraton.

5 Faktor-Faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata Keraton di Cirebon belum efektif

Implementasi kebijakan menurut Kadji (2015:86) bahwa sebuah kebijakan apapun yang siap diimplementasikan, dipastikan bermuara dan bersinggungan langsung dengan tiga dimensi policy of stakeholders atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan yaitu government, private dan civil society. Implementasi kebijakan pengembangan keraton di Kota Cirebon sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian model MSN-Approach implementasi kebijakan dari Kadji (2015:87) yaitu : Mentality-Approach, System-Approach dan Networking-Approach.

Rancangan Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton di Kota Cirebon Berdasarkan Model MSN Approach

Rancangan model implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon berdasarkan Model MSN Approach dan Penta Helix dapat digambarkan sebagai berikut :

Penjelasan dari model di atas yaitu sebagai berikut :

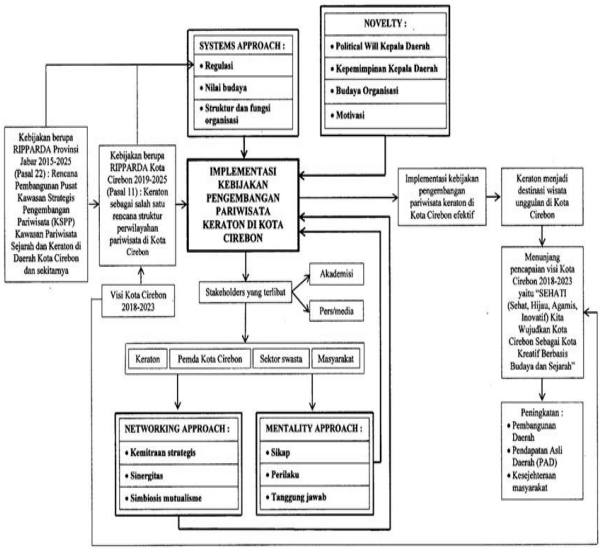

Gambar 3 Rancangan model MSN

1. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon didasarkan pada kebijakan berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Jawa Barat 2015-2025. Di dalam Pasal 22 ditegaskan bahwa salah satu Pembangunan Pusat Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata (KSPP) adalah Kawasan Pariwisata Sejarah dan Keraton di Daerah Kota Cirebon dan sekitarnya.
2. Berdasarkan RIPPARDA Provinsi Jawa Barat 2015-2025 tersebut kemudian disusun RIPPARDA Kota Cirebon 2019-2025. Di dalam Pasal 11 ditegaskan bahwa keraton merupakan salah satu rencana struktur perwilayahan pariwisata di Kota Cirebon. RIPPARDA Kota Cirebon 2019-2025 itu sendiri disusun berdasarkan visi Kota Cirebon 2018-2023 yaitu "SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Inovatif) Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah".
3. RIPPARDA Provinsi Jawa Barat 2015-2025 dan RIPPARDA Kota Cirebon 2019-2025 tersebut merupakan regulasi sebagai dasar hukum pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon. Dalam Model MSN Approach, regulasi ini merupakan bagian dari System Approach yang selengkapnya terdiri dari regulasi, nilai budaya, serta struktur dan fungsi organisasi. Dalam Model MSN Approach, System Approach ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.
4. Kebijakan berupa RIPPARDA Provinsi Jawa Barat 2015-2025 dan RIPPARDA Kota Cirebon 2019-2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.
5. Stakeholders atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon yaitu keraton, Pemda Kota Cirebon, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, perlu keterlibatan dari akademisi dan pers/media.
6. Stakeholders atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon tersebut dalam perspektif Networking Approach perlu membangun kemitraan strategis, sinergitas, dan simbiosis mutualisme. Networking Approach ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.
7. Stakeholders atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon tersebut dalam perspektif Mentality Approach perlu diwujudkan sikap, perilaku, dan tanggung jawab yang efektif. Mentality Approach ini juga akan mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.
8. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon juga perlu mengimplementasikan faktor-faktor lain yang menjadi novelty (kebaruan) dari penelitian penulis yaitu political will kepala daerah, kepemimpinan kepala daerah, budaya organisasi, dan motivasi. Faktor-faktor sebagai novelty itu juga akan mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.
9. Impelementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon yang menerapakan Mentality Approach, System Approach, dan Networking Approach, serta Novelty penelitian penulis, maka akan terwujud impelementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon yang efektif.
10. Impelementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon yang efektif akan menyebabkan keraton menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Cirebon.

11. Jika keraton mampu menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Cirebon, maka akan menunjang pencapaian visi Kota Cirebon 2018-2023 yaitu "SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Inovatif) Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah".

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton di Kota Cirebon

Kebijakan pengembangan pariwisata Keraton di Kota Cirebon dapat dilihat dari dua pandangan yaitu Keraton sebagai Destinasi wisata yaitu berpedoman pada Undang – Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 dan Peraturan Provinsi Jawa barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan kepariwisataan serta RIPPARDA Kota Cirebon No. 07 Tahun 2019 dan Keraton sebagai Cagar Budaya berpedoman pada Undang – Undang No. 11 Tahun 2010. Keraton Cirebon menjadi sasaran pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya karena Keraton masih melestarikan nilai-nilai kearifan lokal budaya. Keraton merupakan bangunan bernilai sejarah dan budaya yang perlu dilestarikan agar tidak punah dengan perkembangan zaman. Sebagai wujud dukungan dan perhatian maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mempertahankan pelestarian bangunan yang bernilai budaya dan sejara maka memprioritaskan pengembangan Keraton di Kota Cirebon sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya dengan rutin menganggarkan setiap tahunnya dana hibah pengembangan keraton pada APBD untuk pemeliharaan keempat Keraton yang ada di kota Cirebon yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan dan Keraton Kaprabonan .

Faktor- Faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton di Kota Cirebon belum Efektif

1. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Keraton di kota Cirebon dalam dimensi Mentality-Approach (Pendekatan Mentalitas) yang terdiri dari sikap, perilaku dan tanggung jawab Pemerintah kota Cirebon terhadap pengembangan pariwisata Keraton belum berjalan secara optimal seperti masih adanya keterbatasan dukungan anggaran untuk pengembangan pariwisata Keraton-keraton yang ada di kota Cirebon. Mentality-Approach yang terdiri dari sikap,perilaku dan tanggung jawab peneliti menyimpulkan masih setengah hati untuk pengembangan keraton tersebut karena pihak keraton masih membatasi diri dengan otoritas yang dimilikinya sehingga pemerintah kota Cirebon tidak dapat totalitas atau ikut campur dalam penataan pengembangan Keraton itu sendiri. Anggaran yang diberikan Pemerintah kota Cirebon dalam APBD Kota Cirebon hanya dapat mencukupi untuk sebagian kecil kegiatan keraton belum untuk pemeliharaan keraton , sehingga Keraton dalam melakukan pemeliharaan dan event-event tradisi yang belum tercover APBD menggunakan pendapatan yang berasal dari tiket masuk pengunjung. Tiket masuk yang diperoleh oleh Keraton tidak disetorkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon semuanya masuk ke pendapatan Keraton. Otoritas inilah yang menjadikan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kota Cirebon belum berjalan optimal.

2. Dimensi System–Approach yang terdiri :Sistem Regulasi, Sistem Budaya dan Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi sudah diimplementasikan hanya belum optimal. Pada sistem regulasi, Bentuk dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kota Cirebon, di mana Keraton di Kota Cirebon memiliki potensi sejarah dan budaya daerah sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan Daerah Kota Cirebon yaitu Terwujudnya Kota Cirebon sebagai destinasi wisata berkelas dunia, yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berbasis sejarah dan budaya daerah. Pada implementasinya masih belum berjalan optimal karena Keraton memiliki otoritas dalam pengelolaan Keratonnya, Pemerintah Daerah tidak dapat intervensi dan ikut campur dalam urusan internal Keraton,berbeda dengan di Yogyakarta Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sultan Keraton yogyakarta sehingga totalitas dalam mengembangkan Keratonnya. Masih ada ego sektoral dalam pengembangan Keraton di Kota Cirebon, Walikota sebagai pemimpin Pemerintahan Daerah Kota Cirebon dan Sultan sebagai Pemimpin Pemangku adat yang memiliki otoritas dalam pengelolaan keratonnya sehingga berjalan masing-masing dan terkotak-kotak.

3. Dimensi Networking-Approach (pendekatan Jejaring) yang terdiri dari kemitraan strategis, Sinergitas, Simbiosis Mutualisme belum diimplementasikan secara optimal dilihat dari peran antar Dinas pada Pemerintahan Daerah, swasta yang belum optimal dalam mensupport melalui CSR nya, peran Sekolah dan Perguruan Tinggi dalam mempromosikan dan memasukan muatan lokal dalam kurikulum pembelajarannya, peran masyarakatpun belum optimal dalam berpartisipasi dan sadar wisata dalam mengembangkan pariwisata Keraton di Kota Cirebon, Novelti atau pembaharuan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan dari teori yang dikemukakan oleh Kadji (2015) yaitu teori tiga pendekatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu : 1). Mentality -Approach (Pendekatan Mentalitas), 2) System-Approach (Pendekatan Sistem), 3) Networking-Approach (pendekatan Jejaring kerjasama). Peneliti menemukan pembaharuan di lapangan ada faktor-faktor lain yang belum dikemukakan oleh Kadji (2015). Faktor-faktor yang belum ada di teori Kadji (2015) merupakan novelty (kebaruan teori yang diperoleh dari hasil penelitian) yaitu sebagai berikut : 1) Political Will Kepala Daerah; 2) Kepemimpinan Kepala Daerah; 3) Budaya Organisasi; 4) Motivasi.

Rancangan model implementasi kebijakan yang efektif untuk mengembangkan pariwisata Keraton di Kota Cirebon berdasarkan model Mentality, System, and Networking (MSN) Approach

1.Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon didasarkan pada kebijakan berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Jawa Barat 2015-2025. Di dalam Pasal 22 ditegaskan bahwa salah satu Pembangunan Pusat Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata (KSPP) adalah Kawasan Pariwisata Sejarah dan Keraton di Daerah Kota Cirebon dan sekitarnya.

2.Berdasarkan RIPPARDA Provinsi Jawa Barat 2015-2025 tersebut kemudian disusun RIPPARDA Kota Cirebon 2019-2025. Di dalam Pasal 11 ditegaskan bahwa keraton merupakan salah satu rencana struktur perwilayahan pariwisata di Kota Cirebon. RIPPARDA Kota Cirebon 2019-2025 itu sendiri disusun berdasarkan visi Kota Cirebon 2018-2023 yaitu "SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Inovatif) Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah".

3.RIPPARDA Provinsi Jawa Barat 2015-2025 dan RIPPARDA Kota Cirebon 2019-2025 tersebut merupakan regulasi sebagai dasar hukum pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon. Dalam Model MSN Approach, regulasi ini merupakan bagian dari System Approach yang selengkapnya terdiri dari regulasi, nilai budaya, serta struktur dan fungsi organisasi. Dalam Model MSN Approach, System Approach ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.

4.Kebijakan berupa RIPPARDA Provinsi Jawa Barat 2015-2025 dan RIPPARDA Kota Cirebon 2019-2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.

5.Stakeholders atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon yaitu keraton, Pemda Kota Cirebon, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, perlu keterlibatan dari akademisi dan pers/media.

6.Stakeholders atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon tersebut dalam perspektif Networking Approach perlu membangun kemitraan strategis, sinergitas, dan simbiosis mutualisme. Networking Approach ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.

7.Stakeholders atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon tersebut dalam perspektif Mentality Approach perlu diwujudkan sikap, perilaku, dan tanggung jawab yang efektif. Mentality Approach ini juga akan mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.

8. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon juga perlu mengimplementasikan faktor-faktor lain yang menjadi novelty (kebaruan) dari penelitian penulis yaitu political will kepala daerah, kepemimpinan kepala daerah, budaya organisasi, dan motivasi. Faktor-faktor sebagai novelty itu

juga akan mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon.

9. Impelementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon yang menerapakan Mentality Approach, System Approach, dan Networking Approach, serta Novelty penelitian penulis, maka akan terwujud impelementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon yang efektif.

10. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata keraton di Kota Cirebon yang efektif akan menyebabkan keraton menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Cirebon.

11. Jika keraton mampu menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Cirebon, maka akan menunjang pencapaian visi Kota Cirebon 2018-2023 yaitu "SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Inovatif) Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah".

12. Jika visi Kota Cirebon 2018-2023 tercapai, maka akan meningkatkan pembangunan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon.

Saran

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton di Kota Cirebon

1) Untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Keraton di Kota Cirebon perlu dibuatkan rancangan kebijakan Peraturan Daerah khusus tentang Pengembangan pariwisata Keraton agar lebih optimal sebagai tempat obyek wisata yang menarik.

2) Untuk meningkatkan kunjungan wisata perlu dibuatkan rancangan Peraturan Daerah tentang penguatan lembaga dalam mengembangkan pariwisata Keraton di Kota Cirebon.

3) Untuk meningkatkan pariwisata di Kota Cirebon perlu dibuatkan aturan kunjungan wisatawan di kota Cirebon dan Empat Keraton menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh wisatwan.

4) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon perlu dibuatkan Peraturan Daerah tentang pajak dari tiket masuk pengunjung ke Keraton.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alamsyah, Kamal, 2009, Reformasi Administrasi Republik Indonesia. Bandung, Program Pascasarjana Unpas.

Anderson, James E, 1969, Public Policy Making, New York, Holt Rinchart and Winston.

Arwildayanto, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi, Bandung, Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi, 2013, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, Rineka Cipta.

Anggara, Sahya, 2014, Kebijakan Publik, Bandung, CV. Pustaka Setia.

Barata, Adaya Atep, 2006, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Jakarta, Gramedia.

Creswel, John W, 2014, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

----------, 2014, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

David, Frer R, 2004, Strategic Management, 4 th Ed New York, Mac Millan Publishing Company.

Denhart, Janet V. et.al., 1998, Public Administration for the Twenty-First Century, Fort Wort : Harcourt Brace & Company.

Dunn, William N, 2006, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, New York : Englwood Cliff, Prentice Hall.

---------- 2003, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2007, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, Elex Media Komputindo.

----------, 2013, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Dye, Thomas R, 1992, Understanding Public Policy, Seventh Edition Engleewood Cliffs New Jersey, Prentice Hall.

Edward III, George, 1980, Implementing Public Policy, Washington DC, Congresional Quartely Press.

Easton, David, 1965, A System Analysis of Political Life, New York, John Willey

Fukuyama, Francis. 1995, Trust. The Social Virtues and the Cration of Prosperit, New York, Pree Press.

Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2007, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, Elex Media Komputindo.

----------, 2013, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Dye, Thomas R, 1992, Understanding Public Policy, Seventh Edition Engleewood Cliffs New Jersey, Prentice Hall.

Edward III, George, 1980. Implementing Public Policy, Washington DC, Congresional Quartely Press.

Easton, David, 1965, A System Analysis of Political Life, New York, John Willey.

Fathoni, Abdurachmat, 2006, Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung, Rineka Cipta.

Gerungan, WA, 2010, Psikologi Sosial, Bandung , PT Refika Aditama.

Gibson at.al. 1997, Organisasi dan Manajemen, Jakarta, Erlangga.

----------, 1997, Organisasi, Perilaku Struktur Proses, Jakarta, Erlangga.

Grindle , S Marrile, 1980, Politics and Policy Implementation in The Third Word, New Jersey, Princeton University Press.

Grindle , S Marrile, and Thomas, John W, 1981, Public Choise and Policy Change, The Political, Economy, of Reform in Developing Countries, Baltimore and London, The John Hopskin Univerity Press.

Golembiewsky, T. Robert, 1977, Pubic Administration as Developing Dicipline, New York, Marcel Dekker, Inc.

Handayaningrat, Soewarno, 2000, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, Haji Masagung.

Harman, Michael M, and Mayer, Richard F, 2014. Terori Organisasi untuk Administrsi Publik, Bantul, Kreasi Wacana.

Hasibuan, S.P. Malayu, 2005. Organisasi dan Motibasi, Jakarta, PT Bumi Aksara.

....., 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Henry, Nicholas, 1975. Public Administration and Pulbic Affairs. Engleewodd Cliffs, New Jersy, Prestice Hill, Inc.

Hersey Paul and Kenneth Blanchard, 1995, Manajemen Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Jakarta, Erlangga.

Islami, M, Irfan, 2016, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanan Negara, Jakarat, PT Bumi Aksara.

Ivancevich, John M at.al, 2006, Perilaku dan Manajeman Organisasi, Jakarta, Erlangga.

Kadji, Yulianto, 2015, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas, Gorontalo, UNG Press

Keban, Yeremis T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep Teori dan Isu, Yogyakarta, Gaya Media

Lubis, M. Solly, 2007, Kebijakan Publik, Bandung, Mandar Maju

Mazmanian, Daniel A, and Paul A, Sabatier. 1983, Implementation and Public Policy, Grenvies Ilinoiw Scott, Foreman and Company.

Maleong, Lexy J., 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Rosdakarya.

Nawawi, Ismail, 2009, Public Policy, PMN, Surabaya.

Nugroho, Riant, 2004, Public Policy : Formulasi, Implementasi dan Evalauasi, Jakarta, Elex Media Computindo

Ndaraha, Taliziduhu, 2003, Budaya Organisasi, Jakarta , Rineka Cipta.

Parson, Wayne, 2005 , Public Policy, Edward Elgar Publishing, Ltd.

Pfiffner, John M. And Robert V. Prestuss, 1960, Publik Administrtion. New York, The Ronald Press Company.

Rahmat, Jalaludin. 2012, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung, PT Remaha Rosdaya.

Rangkuti, Freddy. 2015, SWOT Balanced Scorecard. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Robbins, Stephen P, 1996, Organizational Behavioer, New Jerresy Prentice Hall, INc A Simon & Schuisher Company, Englewood Cliffs.

Rusli, Budiman, 2015, Kebijakna Publik, Membangun Pelayanan Prima yang Responsif, Bandung, CV Adoya Mitra Sejahtera.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2015, Isu-Isu Krusial Publik Kontemporer, Bandung, Mega Rancage Press.

Rodineli, Denis A. 2003, Partening for Development : Feovernment-Private Sector Cooperation in Service Provision dalam Reinventing Government for the Twenty-Fist Country. Editor Denis A. Rodineli & G. Shbir Cheema, Bloomfield, Kumarian Press.

Salusu, J, 1996, Pengambilan Keputusan Stratejik. Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit, Jakarta, Grasindo

Sedarmayanti, 2001, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas, Jakarta, PT Gunung Agung.

----------, 2018, Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata, Bandung, Refika Aditama.

Siagian, Sondang P., 2014, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara.

---------- 2001, Krangka Dasar Ilmu Administrasi, Jakarta, Rineka Cipta

---------- 2001. Filsafat Administrasi, Jakarta, Bumi Aksara

Siegel, Sidney., 1994. Statistik Nonparametik Untuk Ilmu – ilmu Sosial. Jakarta, PT Gramedia.

Sinambela, Lijak Poltak, et.al. 2014, Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta, Bumi Aksara

Smith, Catherine F, 2005, Writing Public Policy, New York,, Oxford University Press.

Smith, T. Alexander, 1975, The Comparative Policy Process, Santo Barbara California, ABC-CLIO.

Sters, M. Richard, 1985, Efktivitas Organisasi, Jakarta, PT Erlangga

Sudjana., 2002. Metode Statistika, Bandung, Tarsito.

Sugiyono, 1990 Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.

----------, 2009. Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.

----------, 2011. Statistika Untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta.

----------, 1990 Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.

Suharno, Yudi Sutarso, 2010, Marketing in Practice, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Syafii, Inu Kencana, 2006, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta, Rineka Cipta.

Steers, Richard M, 1997, Organizational Effectiveness, A. Behavioral View, Santa Monica California, Goodyear Publishing Company Inc.

Sutherland, W, John, 1978, Management Handbook for Public Administration, London, Tornoto, Melbourne, Litton Educational Publising, Inc.

Syafriz, M Jay and Hyde C, Albert, 1978, Classic of Public Administration. Illionis, Moore Publishing Company, Inc.

Syafriz, M Jay, 2000, Defining Public Administration, United State of America, Westiew Press.

Syafii, Kencan, Inu, 206, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta, PT Rineka Cipta

Tjiptono, Fandy, 1997, Prisnip-prinsip Total Quality Service. Yogyakarta, Adni Offset.

Thoha, Miftah, 2014, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Prenamedia Group.

Turmudzi, M. Didi, 2013, Bunga Rampai Sosial Budaya, Bandung, Risma Press.

Van Meter, Van Horn, 1975, A Model of The Policy Implementation, Post Washington, Publishing Co, Ind.

Wahab, Solihin Abdul, 2010, Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.

Waldo, Dwight, 1972, Public Administration in a Tiem of Turbulence, San Fransiso, Chendler.

Westra, Priata dkk. 1999, Ensiklopedi Administrasi, Jakarta, Haji Masagung.

White, Leonard D, 1955, Introduction of Studi of Public Administration. New York, The Ma Millan Company.

Wibowo, Mungin Edi, 2003, Pendidikan Tinggi di Era Pasar Bebas, Suara Merdeka (Senin, 3 Februari 2003).

Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakna Publik, YogyakartA, Media Presindo

----------, 2016, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Jakarta, PT Buku Seru

Yoeti Oka. A, 2016, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Jakarta, Balai Pustaka.

Jurnal

Agustina Pallewa, Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwitata Kabupaten Toraja Utara, Jurnal Katalogis Universitas Tadulako Sulawesi Tengah,Vol. 4 No.7, 2016)

Ali Hasani, Sedigheh Moghavvemi, Amran Hamzah, The impact of Emotional Solidarity on Residents attitude and Tourism Development, Journal SSRN,Public Choice:Analysis of Collective Decision Making E-Journal,PloS ONE 11(6), Juni 2016

Arfandi, Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman, Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau, Vol. 1 No.2, 2017

Azizan Marzuki, Tourism development in Malaysia a Review On Federal Government Policies, Jurnal Theoretical and Empirical in Urban Management, Research Centre in Public Administration and Public Services, Bucharest, Romania , Jilid 5 Terbitan 8(17) Hal.85-97, 2010

Elfira Soeda Soeda, Novie Pioh, Ventje Kasenda, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal Eksekutif Unsrat Manado, Vol.1No.1,2017

Emelyn Novalisa, Syamsul Alam Paturusi, Dewa Putu Oka Prasiasa, Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) Universitas Udayana Bali, Vol.04 No.01, Juli 2017

Feki Lahamadi, Martha Ogotan, Very Londa, Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu studi di Kecamatan Tabelo Kabupaten Halmahera Utara), Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado,Vo.3 No.400, 2016

John Hudson , Policy transferusing the “Gold standard” exploring policy tourism in practice, Researchgate publication Policy and politics Vol. 42 No.4, Oktober 2014

Kwane Asamoah, Policy Implementation : A tool for Enhancing Tourism Development in Ghana, Journal JL Pol’y & Globalization,Vol.10, 2013)

Maksimilianus Maris Jupir, Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Mangga-rai Barat), Journal of indonesian Tourism and Develpoment Studies,Universitas Brawijaya, Vol.1 No.1, 2013

Mohammad Eri Irawan Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Dinamika Maritim Universitas Airlangga, Vol.1No., September 2015

Svetlana Bozhuk and Natalya Pletneva, Issues of Ecostrategies Implementation for Tourism Enterprises in Russia,Journal IES, Vol.39 No3, Januari 2017

Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.08 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tantang RIPPARDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang RIPPARDA Kota Cirebon Tahun 2019- 2025

Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon

Lain-lain

http://indonesiakaya.com mempelajari sejarah Cirebon di Keraton Kasepuhan

https://id.m.wikipedia.org tentang keraton